

**EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN DI DESA
BONJERUK KECAMATAN JONGGAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

Novia Anggraini¹, Iwan Harsono², Siti Sriningsih³

^{1,2,3}Universitas Mataram

Corresponding Author: Noviaanggraini044@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Efektivitas Penggunaan Dana Desa Untuk Pembangunan Di Desa Bonjeruk Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif melalui metode pengumpulan data studi kepustakaan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Prosedur analisis data yang digunakan adalah dengan cara menganalisis rasio efektivitas. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penggunaan dana desa untuk pembangunan di Desa Bonjeruk Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2017-2020 mengalami fluktuasi selama 4 tahun terakhir dengan kriteria efektivitasnya berada pada kategori cukup efektif, efektif dan sangat efektif serta terdapat program yang tidak terealisasi karena terkendala oleh beberapa program yang di prioritaskan pada tahun tersebut

Kata Kunci: Efektivitas, Dana Desa, Pembangunan

1. PENDAHULUAN

Menurut PP Nomor 72 Tahun 2005 yang mengatur tentang Pemerintahan Desa, termasuk didalamnya kewajiban yang tidak bisa ditawar lagi oleh pemerintah desa untuk menyalahgunakan kewenangan dalam hal untuk mengatur dan mengelola keuangannya. Untuk melaksanakan suatu pembangunan maka diperlukan dukungan sumber daya, baik itu dari personil, dana, maupun peralatan atau perlengkapan penunjang. Untuk itulah dalam PP No, 72 tahun 2005 telah mengatur sumber pembiayaan bagi desa sebagai bentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat baik itu dari sumber pendapatan asli desa (PADes), kewajiban pemerintah dari pusat sampai ke Kabupaten/Kota untuk memberikan transfer dana ke Desa berupa hibah atau donasi.

Program yang menunjukkan prioritas menuju Indonesia yang mandiri dalam bidang ekonomi, dirumuskan salah satu agenda prioritas pembangunan, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam rangka negara kesatuan. Prioritas tersebut sangat mendukung semangat desentralisasi dengan pelaksanaan otonomi daerah. Dukungan dalam prioritas tersebut terlihat dari arah kebijakan fiskal dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas belanja negara. Peningkatan tersebut salah satunya

didorong pembangunan desa dalam rangka pemenuhan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengamanatkan dialokasikannya dana desa. Hal ini sangat mendukung penggunaan dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan. (Raharjo, 2018)

Tabel 1 Rincian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019-2022

No	Kecamatan	Tahun (Dalam Rupiah)			
		2019	2020	2021	2022
1	Kopang	9.313.883.500	8.551.851.680	8.388.434.894	9.447.047.600
2	Pringgarata	9.013.856.500	8.513.827.740	6.060.036.957	9.121.523.320
3	Jonggat	10.940.151.500	10.143.335.220	9.836.387.713	10.247.758.520
4	Batukliang	8.728.269.000	5.351.548.560	8.872.724.293	9.960.287.280
5	Praya	5.195.051.000	5.362.110.240	5.240.826.704	5.749.175.960
6	Janapria	10.785.903.700	12.047.386.120	11.849.070.807	12.984.676.240
7	Batukliang	7.277.909.000	7.170.918.200	6.839.604.271	7.798.223.760
8	Praya Barat	8.559.472.000	9.120.864.800	8.901.727.163	10.174.086.080
9	Praya	9.009.985.000	10.365.700.400	9.928.142.962	11.148.355.520
10	Praya Barat	9.186.257.500	9.084.082.140	8.876.264.547	9.910.534.680
11	Praya	5.841.533.500	7.383.340.700	7.267.019.057	8.063.877.432
12	Pujut	14.639.435.000	19.736.482.080	15.536.728.421	17.335.981.400
Total		110.597.580.20	112.831.378.70	109.836.007.10	122.573.273.19

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa rincian anggaran yang diberikan kepada masing-masing kecamatan pada tahun 2019-2022 mengalami kenaikan sebesar 110.597.580,200 rupiah pada tahun 2019 menjadi 112.831.378,100 rupiah pada tahun 2020. Kemudian mengalami penurunan sebesar 109.836.007,100 rupiah pada tahun 2021 dan mengalami kenaikan lagi sebesar 122.573.271,192 rupiah pada tahun 2022. Untuk kecamatan jonggat pada tahun 2019 berada pada posisi kedua terbanyak menerima alokasi dana desa setelah kecamatan pujut yaitu sebesar 10.940.151.500 rupiah dan mengalami penurunan sebesar 10.143.335.220 rupiah atau berada pada posisi keempat pada tahun 2021. Kemudian pada tahun 2021-2022 juga mengalami fluktuasi alokasi dana desa sebesar 9.836.387.713 rupiah pada 2021 dan mengalami kenaikan pada tahun 2022 sebesar 10.247.758.520 rupiah. Selanjutnya untuk alokasi dana desa yang di terima oleh masing-masing desa di kecamatan jonggat dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2 Rincian Anggaran Alokasi Dana Desa di Kecamatan Jonggat Tahun 2019-2022

No	Nama Desa	Tahun (Dalam Rupiah)			
		2019	2020	2021	2022
1	Bunkate	741.344.5	628.465.8	602.872.5	660.891.7
2	Labulia	924.209.5	789.013.7	756.166.3	863.866.6
3	Gemel	781.389.5	686.985.4	681.849.9	745.609.3
4	Batu Tulis	733.555.5	603.335.5	580.921.7	641.812.4
5	Ubung	896.255.5	884.713.3	859.596.3	946.657.2

6	Jelantik	907.981.5	917.797.7	891.042.6	981.648.6
7	Perina	729.844.5	601.121.5	575.081.7	631.700.4
8	Sukarara	875.700.5	786.770.1	764.567.7	854.160.0
9	Barejulat	845.115.5	795.600.4	779.226.1	860.425.3
10	Puyung	944.777.5	961.790.0	931.687.1	1.035.301.9
11	Nyerot	737.322.5	622.891.8	601.190.1	657.724.7
12	Pengenjek	936.027.5	976.276.3	947.211.5	1.044.278.2

Pada tabel 2 diatas dapat di jelaskan bahwa desa bonjeruk berada pada posisi ke 6 terbanyak dalam menerima alokasi dana desa dari seluruh desa yang berada di kecamatan jonggat yaitu sebesar 886.717.500 pada tahun 2019 dan mengalami kenaikan pada tahun 2020 sebesar 888.573.364 rupiah atau berada pada posisi ke 4, akan tetapi mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 864.973.364 kemudian pada tahun 2022 mengalami kenaikan lagi sebesar 955.382.280 rupiah. hal ini di duga karena pemerintah desa tidak bisa mengelola dana yang telah di berika dengan baik. Oleh karena itu apabila suatu program tidak dapat dilaksanakan secara baik atau dikatakan kurang dari target yang telah ditetapkan maka akan mempengaruhi dana yang akan diterima pada tahun berikutnya.

Penerimaan dana desa oleh pemerintah desa Bonjeruk yang disalurkan oleh pemerintah pusat ke Rekening Kas Desa yang merupakan tempat penyimpanan uang pemerintahan desa untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran desa yang di transfer dari Rekening Kas Umum Daerah yang bersumber dari Rekening Kas Umum Negara pada tahun 2017-2020 oleh pemerintah desa digunakan untuk pembangunan yang ada di desa. Untuk lebih jelasnya mengenai target dan realisasi anggaran untuk pembangunan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3 Target dan Realisasi Anggaran Pembangunan Tahun 2017-2020

No	Tahun	Target (Dalam Rupiah)	Realisasi (Dalam Rupiah)
1	2017	1.151.275.000,00	1.182.671.937,1
2	2018	831.248.276,52	860.271.613,91
3	2019	1.108.159.000,00	1.102.343.000,0
4	2020	1.214.159.500,00	593.434.000,00

Pada tabel 3 dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2017-2020 target anggaran maupun realisasi mengalami fluktuasi. Dimana pada tahun 2017 target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 1.151.275.000,00 yang terealisasi sebesar Rp 1.182.671.000,00 sedangkan pada tahun 2018 target anggaran yang di tetapkan untuk pembangunan menurun menjadi Rp 831.248.276,52 dan yang terealisasi Rp 860.271.613,91. Kemudian pada tahun 2019-2020 mengalami kenaikan sebesar Rp 1.108.159.000,00 yang terealisasi Rp 1.102.343.000,00 untuk tahun 2019 dan untuk tahun 2020 Rp 1.214.159.500,00 yang terealisasi sebesar Rp 593.434.000,00. Hal ini diduga Desa Bonjeruk melakukan berbagai kebijakan dalam penggunaan dana desa bisa terealisasikan dengan baik.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Lokasi penelitian di Desa Bonjeruk Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini data sekunder yang bersumber langsung dari hasil publikasi instansi pemerintah desa bonjeruk. Teknik dan alat pengumpulan data yang digunakan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil perhitungan dalam penelitian ini nantinya akan menggunakan rasio efektivitas.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka pembangunan daerah, karena didalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya secara langsung menyangkut kepentingan sebagian besar masyarakat yang ada di desa Bonjeruk dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat. Terkait proses penggunaan dana desa untuk pembangunan di desa Bonjeruk, Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, pemerintah desa Bonjeruk terlebih dahulu menyusun tim pelaksana untuk menjalankan pembangunan yang berjumlah 7 orang yaitu kaur perencanaan, sekdes, kaur Kesra sekaligus bendahara desa yang bertanggung jawab atas dana yang akan di gunakan dan dibantu oleh lembaga kemasyarakatan di desa.

Berdasarkan data yang di peroleh dari hasil perhitungan rasio efektivitas, dapat dijelaskan bahwa efektivitas penggunaan dana desa untuk pembangunan di Desa Bonjeruk berada pada kriteria efektivitas tidak efektif sampai sangat efektif dari tahun 2017-2020 dengan 5 jenis sub bidang dalam pembangunan. Pada tahun 2017 terdapat sub bidang pekerjaan umum & penataan ruang yang dengan 4 (empat) program yaitu, pembukaan jalan desa dengan persentase sebesar 100 persen atau dikatakan efektif yang dilakukan di dusun Bonjeruk duah yang dilakukan dengan cara gotong royong.

Selanjutnya penyaluran jalan desa dan rabat jalan desa dengan kriteria efektivitas sangat efektif dimana pada kedua program ini telah dijalankan sesuai dengan perencanaan dan sudah memenuhi target yang telah ditetapkan dan sangat diprioritaskan oleh pemerintah desa Bonjeruk. Pada program rabat jalan desa ini realisasi atau pengeluaran anggaran lebih sedikit dari target anggaran sehingga persentase mencapai 103 persen. Penyaluran jalan desa dilakukan di dusun peresak dan dusun bunbuak dengan persentase sebesar 100 persen, untuk program rabat jalan desa dilaksanakan di dusun dasan bengkel, dasan ketujur, manggong timuk dan peresak. Kemudian untuk tenaga kerjanya sendiri dilakukan oleh masyarakat desa bonjeruk dan menggunakan eskavator. Sedangkan untuk program pemasangan paving block jalan desa tidak dijalankan karena pada saat perubahan program pemasangan paving block dihapuskan, oleh karena itu program tersebut tidak dijalankan dan dikatakan tidak terealisasi. (Kaur Keuangan). Kemudian pada tahun 2018 terdapat 3 sub bidang pembangunan yaitu, sub bidang kesehatan, sub bidang pekerjaan umum & penataan

ruang dan sub bidang kawasan pemukiman.

1. Sub Bidang Kesehatan terdapat program pengadaan sarana & prasarana posyandu dengan persentase 100 persen atau berada pada kriteria efektif dimana program yang telah direncanakan sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan telah merealisasikan anggaran sesuai dengan target yang telah ditentukan yang dilaksanakan di 2 dusun yaitu dusun bat peken timuk dan dusun bejelo.
2. Sub Bidang Pekerjaan Umum & Penataan Ruang terdapat 3 program yaitu, 1) pembukaan jalan desa dengan persentase sebesar 100 persen atau efektif yang dijalankan di dusun bonjeruk duah. 2) penyaluran jalan desa dengan persentase sebesar 100 persen pada kriteria efektivitas efektif serta sudah memenuhi target anggaran dan sudah sesuai dengan perencanaan yang dilaksanakan di dusun dusun bonjeruk duah. 3) rabat jalan desa yang pada tahun 2017 berada pada persentase 103 persen dan pada tahun 2018 di programkan lagi dengan persentase meningkat sebesar 105 persen berada pada kriteria sangat efektif, program ini dilaksanakan di 3 dusun yaitu dusun bat peken timuk, bat peken bat dan dusun peresak. Yang menyebabkan persentase anggarannya melebihi target yaitu karena pengeluaran anggaran lebih sedikit dibandingkan target yang ditetapkan untuk dibelanjakan.
3. Sub bidang kawasan pemukiman terdapat program pembukaan jaringan air bersih berskala desa dengan persentase sebesar 100 persen pada kriteria efektif serta telah dijalankan sesuai dengan perencanaan dan memenuhi target anggaran yang dilaksanakan di dusun montong tangar.

Selanjutnya pada tahun 2019 terdapat 5 sub bidang pembangunan yaitu; sub bidang pendidikan, sub bidang kesehatan, sub bidang pekerjaan umum & penataan ruang, sub bidang kawasan pemukiman dan sub bidang pariwisata.

1. Sub bidang pendidikan memiliki program penyelenggaraan PAUD/Madrasah non formal milik desa yang direncanakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa dengan persentase yang capai sebesar 100 persen dengan kriteria efektif yang dijalankan di dusun bat peken.
2. Sub bidang kesehatan memiliki program penyelenggaraan posyandu dijalankan di dusun peresak, bunbuak, dan dusun manggong yang dimana pada tahun 2019 ini sangat di prioritaskan pada bidang kesehatan karena memasuki kawasan yang membutuhkan program tersebut. Oleh karena itu persentase yang dicapai juga berada pada persentase sebesar 100 persen dengan kriteria efektif, karena sudah terealisasikan sesuai dengan target anggaran.
3. Sub bidang pekerjaan umum & kawasan pemukiman memiliki 2 program yaitu pemeliharaan prasarana jalan desa yang dilaksanakan di dusun bat peken bat dan pengerasan jalan lingkungan yang dulaksanakan di dusun berejeng, batu jering, dasan

bengkel, dengan persentase sebesar 100 persen dan 105 persen dengan kriteria efektivitasnya berada pada kriteria efektif dan sangat efektif. Pemeliharaan jalan desa yang dimaksud disini yaitu perbaikan kerusakan jalan yang sudah parah atau perawatan bahu jalan demi kenyamanan masyarakat.

4. Sub bidang kawasan pemukiman memiliki 2 program yaitu rehab rumah tidak layak yang dijalankan di dusun bat peken barat, peresak, bat peken timuk, rejeng dan peningkatan sumur resapan yang dilaksanakan di dusun bat peken bat, peresak, dan bonjeruk duah. Pada kedua program tersebut persentase yang diperoleh sama-sama 100 persen dengan kriteria efektif. Yang dimana pada program rehab rumah tidak layak ini yaitu rumah yang sudah tidak layak dipakai dan telah disurvey secara teliti oleh petugas desa yang diperuntukkan untuk masyarakat parubaya dan untuk peningkatan sumur resapan dapat dimanfaatkan masyarakat desa sebagai sumber utama di suatu lingkungan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.
5. Sub bidang pariwisata memiliki program pengembangan pariwisata tingkat desa yang dilaksanakan di dusun bonjeruk bat dengan persentase yang diperoleh sebesar 93 persen dan masih berada pada kriteria efektif. Tujuan dari pengembangan pariwisata tingkat desa ini agar masyarakat desa bisa meningkatkan perekonomian desa serta sumber daya manusia yang ada.

Selanjutnya pada tahun 2020 terdapat 4 sub bidang pembangunan yaitu; sub bidang kesehatan, sub bidang pekerjaan umum & penataan ruang, sub bidang kawasan pemukiman dan sub bidang pariwisata.

1. Sub bidang kesehatan memiliki 3 program yaitu; 1) penyelenggaraan posyandu yang dilaksanakan di dusun bonjeruk dalam, dusun manggong, bejelo, dasan bengkel, loang tune dimana pada tahun sebelumnya sudah di jalankan kemudian di programkan lagi pada tahun 2020 serta mengalami penurunan persentase sebesar 82 persen. Hal tersebut terjadi karena terdapat di beberapa dusun yang dikatakan masih layak atau tidak ada perbaikan. 2) penyelenggaraan desa siaga kesehatan dengan persentase 97 persen . program ini dijalankan agar masyarakat desa mendapatkan fasilitas kesehatan seperti halnya vaksinasi, jaminan kesehatan yang dilakukan di puskesmas yang ada di desa bonjeruk sendiri. Dan yang ke 3) pengadaan sarana & prasarana posyandu, dimana pada program ini tidak dijalankan meskipun sudah di anggarkan pada APBDes akan tetapi pada saat perupahan di hapuskan kemudian dialihkan untuk COVID-19 dan dialihkan ke tahun berikutnya untuk dijalankan oleh karena itu persentase yang didapat sebesar 0,00 persen dan dikatakan tidak terealisasi.
2. Sub bidang pekerjaan umum & penataan ruang memiliki 3 program yaitu; 1) pemeliharaan prasarana jalan desa, 2) pengerasan jalan lingkungan dan 3) pembuatan peta wilayah dan sosial desa. Ketiga program tersebut telah diprogramkan pada tahun 2019 kemudian di programkan lagi pada tahun 2020. Akan tetapi pada tahun 2020

ketiga program tersebut tidak dijalankan dikarenakan sebagian program yang sudah di anggarkan pada APBDes dihapuskan pada saat perubahan untuk dialihkan pada COVID-19 sehingga diprogramkan kembali pada tahun berikutnya sehingga persentase yang di dapat sebesar 0,00 persen sehingga dikatakan pada program tersebut tidak terealisasi.

3. Sub bidang kawasan pemukiman memiliki 3 program yaitu; 1) rehab rumah tidak layak yang dilaksanakan di dusun purwangsih, bonjeruk duah, dan bat peken timuk dengan persentase 100 persen, program ini dijalankan karena untuk melanjutkan rehab rumah yang belum diselesaikan pada tahun 2019. Kemudian untuk program ke 2) pemeliharaan sumber air bersih dengan jumlah persentase sebesar 0,00 persen dan ke 3) peningkatan sambungan air bersih kerumah dengan persentase sebesar 0,00 persen. Kedua program tidak bisa dijalankan karena terkendala oleh COVID yang secara tidak langsung pada saat perubahan, program yang tidak bisa dijalankan harus dihapuskan dan dialihkan ke tahun berikutnya.
4. Sub bidang pariwisata memiliki program pengembangan pariwisata tingkat desa yang telah dijalankan pada tahun 2019 dan di programkan lagi pada tahun 2020 dengan persentase meningkat sebesar 100 persen dan masih berada pada kriteria efektif yang dilaksanakan di dusun bonjeruk bat. Dengan adanya program pengembangan pariwisata tingkat desa akan menjadikan desa tersebut lebih maju dan bisa memanfaatkan sumber daya manusia serta menjadikan desa bonjeruk sebagai tempat wisata kuliner yang diminati oleh masyarakat setempat maupun masyarakat luar desa.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dari pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa apabila dilihat dari anggaran keseluruhan pada tahun 2017-2020 mengalami fluktuasi selama 4 tahun terakhir dengan kriteria efektivitasnya adalah pada tahun 2017-2018 kriteria efektivitas berada pada efektif dan sangat efektif serta terdapat satu program yang tidak terealisasi, pada tahun 2019 berada pada kriteria efektif dan sangat efektif dikarenakan program-program tersebut dijalankan sesuai perencanaan dan pada tahun 2020 berada pada kriteria dari yang tidak terealisasi, cukup efektif sampai sangat efektif sehingga bisa dikatakan sebagian besar program pada tahun 2020 tidak dapat terealisasi karena terkendala COVID-19. Hal ini mengidentifikasi bahwa penggunaan dana desa sudah dilaksanakan secara optimal meskipun masih ada yang tidak terealisasi dengan adanya program yang tidak bisa dijalankan karena terkendala oleh beberapa hal sehingga tidak sesuai dengan perencanaan. Oleh sebab itu disarankan kepada pemerintah desa dengan melihat dari data yang di dapatkan bahwa pembanguna fisik maupun non fisik masih terdapat beberapa program pembangunan yang tidak bisa dijalankan sehingga mengakibatkan dana desa yang sudah ditargetkan untuk program tersebut menjadi terhambat, oleh karena itu untuk pemerintah desa sebaiknya lebih teliti dan lebih bisa melihat keadaan desa dana pa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat

agar program tersebut bisa berjalan dengan lancar serta dapat menciptakan desa yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Nugrantara, Pafta Ubay.2022. Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Bidang Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas. Fakultas Ekonomi & Bisnis Unseod.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor.72 Tahun 2005. Tentang Desa (c. 72) Jakarta, Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor. 60 Tahun 2014. Tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN.
- Sudaryono Dkk. 2017. Keuangan Di Era Otonomi Daerah. Yogyakarta. Cv. Andi Offset. Raharjo, Taufik. Sulaeman, Agus Sunarya. Sriyani. 2018. Efektifitas Penggunaan Dana Desa.
- Rorong, Marliyanti. 2015. Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa Bango Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2015. Program Studi Ilmu Pemerintahan Fispol Unsat.